

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Alamsyah D, Nandang, 2018, *Administrasi Pertanahan*, Cetakan 16, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Harsono, Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- HS, Salim, 2016, *Teknik Pembuatan akta Pejabat pembuat akta tanah (PPAT)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2011, *Hukum Kontrak Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismaya, Samun, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, cetakan ketiga (edisi revisi), Karya Media, Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P, 1994, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Agrarian Kajian Komprehensif*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- _____, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Thamrin, Husni, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbag Pressindo, Yogyakarta.

Thoha, M, 1989, *Pembinaan Organisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Y. Wartaya Winangun, SJ, 2004, *Tanah Sumber Nilai Hidup*, Cetakan 1, Kanisius, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)

Peraturan Menteri Permen Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Jurnal dan Tesis

Agung, Ayu Gusti, “Peranan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Dalam Menjalankan Fungsi Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Melakukan Pembuatan Akta Tanah di Luar Tempat Kedudukannya”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2), Universitas Gadjah Mada, 2021.

Aryo, Nugroho Bimo, “Peran Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) dalam Pengawasan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang Tidak Memiliki Izin Cuti di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2), Universitas Gadjah Mada, 2020.

Fabriabi, Muhamad Akil, “Perbandingan Netralitas organ Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Dengan Organ Pengawas Notaris Dalam Menjalankan Fungsinya”, *Jurnal hukum dan Kenotariatan*, Volume 1, Nomor 002, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.

Hasan, Abdillah Nur, “Peran Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) dalam Pengawasan Kode Etik Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang Mengirimkan Minuta Kepada Klien di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2), Universitas Gadjah Mada, 2021

Mustika Nila Dara, “Pengawasan Terhadap PPAT Oleh Majelis Pembina dan Pengawas Daerah di Kota Padang”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2), Universitas Gadjah Mada, 2021.

Ordes, Mulya Darma, “Autentisitas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Sepurna”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2), Universitas Islam Indonesia, 2017

Purna Noor Aditama, 2018, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli”, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 3, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Januari, 2019

Qadhafi, Noammar, “Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Notaris Yang Bersetatus Sebagai Narapidana Di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2), Universitas Gadjah Mada, 2018.

Rico, Febrianto Genavo, “Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Menjaga Kehormatan Profesi Notaris di Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2), Universitas Islam Indonesia, 2016.

Suroso, “Implikasi Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Mnyebutkan Keturunan Tionghoa Dalam Komparasi (Studi Tentang Pendaftaran Tanah Di Yogyakarta)”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2), Universitas Islam Indonesia, 2018.

Twidesyadinda, Vania, “Persetujuan Majelis Kehormatan Dalam Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2), Universitas Gadjah Mada, 2021.

Wibowo Tri, Andaru, “Kepatuhan PPAT Kabupaten Malang Terhadap Kode Etik Oleh Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MP2D)”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 6, Nomor 2, 2022

C. Internet

Effendhie, Machmoed, “Modul pengantar Organisasi, Organisasi Tata Laksana dan Lembaga Kearsipan”, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ASIP420902-M1.pdf>, di akses pada 21 Maret 2022 pukul 19.39 WIB

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Daftar PPAT”, <https://kab-klaten.atrbpn.go.id/daftar-ppat>, di akses tanggal 1 Oktober 2022, pukul 11.47 WIB.